

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kismartini & Irfan Murtadho Yusuf, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2023.

Elfis Purba, *Metode Penelitian*. Medan: Penerbit Universitas HKBP Nommensen, 2011.

Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

Serlika Aprita, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : Bina Aksara, 1982.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada Pers, 1994.

Toman Sony, *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2019.

Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Penerbit UNIMAL Press, 2019.

Eka Deviani & Rifka Yudhi, *Hukum Kepegawaian Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara PNS & PPPK*. Bandarlampung:Pusaka Media,2022.

S.F Marbun dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sri Hartini & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Abdul Khakim. 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administratif Law* . Yogyakarta:Gajah mada University Press, 2008.

### JURNAL

Dicky Agus Saputro. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Feb. 2015.

Henny Juliani. "Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja." *Administrative Law and Governance Journal* 2, nomor. 2 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.314-325>

Galuh, "Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)". *VeJ* 3, No. 2, (December 13, 2017), DOI: 10.25123/vej.2668.

Elim Riedel. "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya". *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 4 (2018), Vol. 6 No. 4 (2018): Lex Administratum.

Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021) DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

Ully Sigar dkk, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1 (Jan-Mar 2021)

Hernawan, Ari. "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha dalam Mogok Kerja." *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 3, 2012, doi:10.22146/jmh.16119.

Rizky & Sonhaji . "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Honorar)." *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 3 (September 2022). [https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.523 - 535](https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.523-535)

## **PERATURAN**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorar yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Surat Menteri PANRB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN, Jakarta, 25 Juli 2023

PP nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Surat Pengumuman Nomor B/800/010/Tahun 2022 tentang Uji Publik Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang,

#### **ARTIKEL/BERITA/INTERNET**

Kompas, Agustus, 26, 2023

Rosseno Aji Nugroho, “ Ini Lho Beda Status PNS & PPPK di UU ASN 2023,” CNBC, September 6, 2023

Rosseno Aji Nugroho, Pegawai Honorer Sisa 1,6 Juta di 2024, Gimana Nasibnya?, CNBC Indonesia, 13 November, 2023

Redaksi, Syarat Terbaru Honorer Otomatis Diangkat Jadi ASN di 2024, CNBC, 16 November, 2023

Rosseno Aji Nugroho, Nih! 3 Rencana Selamatkan Honorer, Bisa Langsung Jadi ASN, CBNC, 13 November 2023

WEB resmi BKPP Kota Semarang,  
<https://sisdm.semarangkota.go.id/publik/statistik?bulan=12&tahun=2023>

Ervira Octaviola Kurniawan, “Gaji Tenaga Honorer di Seluruh Provinsi Indonesia Resmi Diteken Sri Mulyani, Golongan Ini Paling Cuan!”, Januari, 21, 2024, <https://www.ayobandung.com/umum/7911590036/gaji-tenaga-honorer-di-seluruh-provinsi-indonesia-resmi-diteken-sri-mulyani-golongan-ini-paling-cuan?page=1>

Muhammad Idris, Memahami Perbedaan Gaji Honorer dengan PPPK, Kompas, 6 Januari 2021

Henny Purwanti, “Keseimbangan antara hak dan kewajiban”, (Jakarta. Kementerian Keuangan, 2022), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>

Kumparan, “Pengertian serta Perbedaan THK 2 dan THK 1,” November, 22, 2022

Radar Kepahiang.id, Pahami Perbedaannya, Berikut Ini Beberapa Jenis Tenaga Honorer di Indonesia, 4 Agustus 2023.

Ervira Octaviola Kurniawan, “Meski Gagal Diangkat Jadi PPPK, MenPANRB Beri Jaminan Nasib Tenaga Honorer Aman Lewat SE Ini”, Januari, 21, 2024, <https://www.ayobandung.com/umum/7911591126/meski-gagal-diangkat-jadi-pppk-menpan-rb-beri-jaminan-nasib-tenaga-honorer-aman-lewat-se-ini?page=2>

Komisi II, Revisi UU ASN Bentuk Perhatian Pada Pengabdian Tenaga Honorer, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46898/t/Revisi+UU+ASN+Bentuk+Perhatian+pada+Pengabdian+Tenaga+Honorer>

## LAMPIRAN

